

STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA BONTO SINALA, KABUPATEN SINJAI

Oleh:
Zulkifli Arifin¹ & Abd. Gani Gaffar²
STISIP Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Program Desa Mandiri Pangan di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai adalah program pembangunan yang bersifat partisipatif yang mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat secara aktif pada setiap tahapan kegiatan, yang mengarah pada pendekatan pembangunan *top down* dan *bottom up*. Walaupun belum tentu juga program pembangunan partisipatif akan berhasil dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan suatu penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap Program Desa Mandiri Pangan, sehingga dapat direkomendasikan suatu pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan yang baik dan partisipatif.

Lingkup wilayah penelitian adalah Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai yang merupakan desa rawan pangan serta mempunyai potensi penyebab rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Desa mandiri pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yang menggunakan beberapa tahapan setelah data terkumpul, yang meliputi tahapan reduksi data dan penyajian data sebelum dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Implementasi kegiatan program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai masih berjalan sampai tahun pertama, serta banyak kegiatan yang terdapat dalam setiap tahapan kegiatan dari mulai persiapan, penumbuhan sampai akhirnya pengembangan yang menunjukkan keberhasilan, memang berdasarkan identifikasi program, masih ada beberapa hal yang kurang sesuai dari kegiatan yang telah diimplementasikan tersebut. Partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai berada pada tingkatan *partnership* sesuai dengan tingkatan partisipasi Arstein yang dicirikan dengan adanya partisipasi secara aktif dari masyarakat pada program baik pada tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi termasuk dalam pemecahan permasalahan yang timbul.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat; program desa mandiri pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang kompleks, terdiri dari subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi. Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan mengartikan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Menurut Agus (2008) Pemerintah sangat berperan dalam menyediakan prasarana sosial-ekonomi. Disamping itu, sistem pemerintahan otonomi daerah telah menyebabkan penurunan intensitas dukungan dan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha di bidang pangan. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah Desa Bonto Sinala dalam pemantapan

ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengatasi masalah pangan yang terjadi baik di dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Program Desa Mandiri Pangan dilaksanakan selama 4 (empat) tahap berturut-turut melalui 4 tahapan pelaksanaan yaitu: tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Tiap tahapan memuat berbagai macam kegiatan dengan waktu pelaksanaan tiap tahapan adalah selama satu tahun. Kegiatan difokuskan di daerah rawan pangan dengan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang telah ada di tingkat desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping di setiap desa pelaksana selama empat tahun berturut-turut mulai dari tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian.

Program Desa Mandiri Pangan di Desa Bonto Sinala adalah program pembangunan yang bersifat partisipatif yang mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat secara aktif pada setiap tahapan kegiatan, yang mengarah pada bertemunya pendekatan pembangunan *top down* dan *bottom up*. Secara riil operasional program baik dalam penentuan lokasi dan operasional awal pelaksanaan program terdapat senjang karena masih menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat *top down* dalam artian, proses perencanaan, penentuan lokasi, penentuan tahapan kegiatan dan pelaksanaan program awal belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat berupa tinjauan dan komentar terhadap program merupakan peran yang paling sederhana dari masyarakat belum muncul, sehingga dikhawatirkan dukungan dan rasa memiliki masyarakat terhadap program tidak akan muncul yang berimbas pada capaian program yang kurang maksimal.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan suatu penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap Program Desa Mandiri Pangan di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai, sehingga dapat direkomendasikan suatu pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan yang perlu dilakukan. Masalah yang diangkat akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu: "Sejauhmana partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai".

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian sejauhmana partisipasi masyarakat terkait dengan keberadaan program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai. Adapun sasaran penelitian ini antara lain adalah: 1) Mengidentifikasi program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala; 2) Mengkaji partisipasi masyarakat pada operasional program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala; 3) Melakukan evaluasi tujuan dan pencapaian program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala; 4) Mencari alternatif pemecahan masalah pelaksanaan program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Dasar dan Teori Partisipasi Masyarakat

Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46). Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D (2009: 37), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 39-40) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan, merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Menurut Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 39), ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program.
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- d. Partisipasi dalam evaluasi, berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah

sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Partisipasi berdasarkan tingkatannya dapat dibedakan menjadi 7 tingkatan, yaitu:

- a. *Manipulation*, merupakan tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.
- b. *Consultation*, yaitu dimana stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
- c. *Consensus-building*, yaitu dimana pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.
- d. *Decision-making*, yaitu dimana konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggungjawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
- e. *Risk-taking*, yaitu dimana proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan resiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.
- f. *Partnership*, yaitu memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggungjawab.
- g. *Self-management*, yaitu puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar (*learning process*) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

2. Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pembangunan

Program Desa Mandiri Pangan pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat yang menekankan penerapan pelaksanaan penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat di tingkat lokal berdasar prinsip pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Kegiatan Program Desa Mandiri Pangan mengutamakan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola masyarakat secara langsung dalam wadah kelembagaan- kelembagaan lokal yang dikoordinasikan oleh lembaga lokal baik desa, kecamatan dan tingkatan di atasnya.

Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung (*stakeholders*) akibat adanya proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik. yang umumnya berisikan arah, tujuan, cara dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan.

Pemberdayaan yang akan dilakukan memerlukan langkah-langkah yang riil dalam penanganannya. Langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkan tujuan adalah melalui:

- a. Membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Dua hal yang mendasar dalam membentuk iklim bagi masyarakat adalah dengan;
 - 1) Menyadarkan masyarakat dan memberikan dorongan/motivasi untuk berkembang. Proses menyadarkan masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengenal wilayahnya melalui *survey* dan analisis. Proses ini disebut dengan *participatory survey* dan *participatory analysis*.
 - 2) Memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menggambarkan dan merencanakan wilayah, yang disebut dengan *participatory design and planning*. Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat secara psikologis akan memberikan rasa *ke-berpihak-an* kepada masyarakat.
- b. Memperkuat potensi yang ada, dilakukan dengan mengorganisasi masyarakat dalam kelompok-kelompok/komunitas pembangun, yang selanjutnya dikembangkan dengan memberikan masukan-masukan/input serta membuka berbagai peluang-peluang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya.
- c. Proses Perlindungan (Pendampingan), secara aplikatif *empowerment* terhadap kelompok masyarakat bawah dan menengah dilakukan melalui 2 (dua) hal yaitu:
 - 1) Penguatan Akses/*Accesibility Empowerment*, dilakukan melalui menciptakan akses dari kelompok informal kepada kelompok formal, kelompok yang diberdayakan dengan kelompok pemberdaya.
 - 2) Penguatan Teknis/*Technical Empowerment*, dilakukan sebagai bagian dari kegiatan *advocacy* sehingga dapat diwujudkan peningkatan kapasitas dari kelompok yang diberdayakan.

3. Peningkatan Ketahanan Pangan di Masyarakat

Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudahmemperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Hal ini diwujudkan dengan bekerjanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Indonesia sebagai negara agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Sejalan dengan permasalahan, peluang dan paradigma baru pemantapan ketahanan pangan, strategi yang dikembangkan dalam upaya pemantapan ketahanan pangan adalah:

- a. Pengembangan kapasitas produksi pangan nasional melalui rehabilitasi kemampuan, optimalisasi pemantapan dan pelestarian sumberdaya alam.
- b. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menuju terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga, serta perilaku sadar gizi.
- c. Pengembangan agribisnis pangan yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan tersentralisasi.
- d. Pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama lintas pelaku, lintas wilayah dan lintas waktu dalam suatu sistem koordinasi guna mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan.
- e. Peningkatan efektifitas dan kualitas kinerja pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat berpartisipasi dalam pemantapan ketahanan pangan.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang terdiri dari 3 dusun antara lain Dusun Bongki-bongki, Dusun Tomantang dan Dusun Polewali.

2. Tahapan-tahapan Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian tentang partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala diperlukan beberapa tahap yang harus dilakukan. Terdapat tiga garis besar tahap-tahap dalam penelitian, yaitu:

- a. Tahap perencanaan yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut berikut: a) Menentukan tema penelitian; b) mengidentifikasi masalah; c) mengadakan studi pendahuluan; d) menyusun rencana penelitian; e) menentukan informan penelitian; f) menyusun rencana penelitian.
- b. Tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan kegiatan penelitian meliputi, pengumpulan data dan menganalisis data.
- c. Tahap penulisan laporan, merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian dengan membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca atau penyandang dana.

3. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, memo, dan dokumentasi resmi lainnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan alasan pendekatan kualitatif yakni adanya kedekatan dalam struktur dan proses serta adanya tahap-tahap dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan, adapun tahap-tahap analisis data kualitatif akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Analisis data kualitatif sebelum di lapangan, dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Dalam penyusunan proposal, peneliti menentukan fokus penelitian untuk mencari data dari sumber data, termasuk karakteristiknya.
- b. Analisis data kualitatif di lapangan, dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Langkah yang dilakukan adalah: Tahap Reduksi Data, Tahap penyajian data/analisis data setelah pengumpulan data, Tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Identifikasi Program Desa Mandiri Pangan Tahap Persiapan dan Penumbuhan Di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai

Pada bagian pembahasan ini, akan dilakukan identifikasi program desa mandiri pangan khususnya pada tahapan persiapan dan penumbuhan. Fokus identifikasi program desa mandiri pangan tahap persiapan dan penumbuhan adalah: 1) Seleksi desa yang meliputi seleksi desa

mandiri pangan, sosialisasi desa mandiri pangan, penyusunan data dasar desa, penyusunan rencana pembangunan desa partisipatif. 2) Pemberdayaan masyarakat yang meliputi pendampingan, pelatihan, dan 3) Penguatan kelembagaan yang meliputi pembentukan kelompok fasilitator, pemberdayaan kelompok afinitas.

Secara lebih dalam dapat diuraikan identifikasi program pada masing-masing kegiatan pada tahapan desa mandiri pangan:

a. Seleksi Desa

Proses seleksi dilakukan berdasarkan data pemetaan rawan pangan yang dilakukan di tingkat kabupaten. Sasaran pelaksanaan seleksi desa diarahkan kepada desa miskin yang memenuhi syarat yang ditetapkan bersama dan diutamakan desa yang belum pernah tersentuh proyek atau program pemerintah sebelumnya. Tahapan pelaksanaan seleksi desa tingkat kabupaten dimulai dengan pertemuan program desa mandiri pangan di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh dinas terkait di tingkat kabupaten dan pemerintah daerah. Kegiatan dimulai dari pemetaan desa-desa miskin yang ada di kabupaten tersebut sesuai data sekunder yang diperoleh dari pemerintah daerah dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

b. Sosialisasi Desa Mandiri Pangan

Sosialisasi desa mandiri pangan dilakukan pada tahun berjalan pada tahap persiapan bersamaan dengan kegiatan penetapan desa mandiri pangan. Proses sosialisasi dilakukan berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten sampai kecamatan dan desa. Sosialisasi dilakukan melalui forum dewan ketahanan pangan dengan menghadirkan aparat instansi teknis, swasta dan tokoh masyarakat setempat difasilitasi oleh dinas pertanian sebagai stake holder pelaksana program desa mandiri pangan.

c. Penyusunan Data Dasar Desa

Penyusunan data dasar desa (data base) dilakukan dalam dua tahap, yaitu : Pengumpulan Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) dan Survei Rumah Tangga (SRT). Data lain yang dikumpulkan adalah profil desa. Pada awal pelaksanaan program data dasar desa dikumpulkan dari seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Bonto Sinala untuk selanjutnya diolah lebih lanjut untuk mendapatkan sejumlah KK miskin yang nantinya akan mendapatkan manfaat awal dan langsung dari desa mandiri pangan. Data base tersebut selanjutnya digunakan sebagai: 1) Data dasar untuk penyusunan rencana pembangunan desa mandiri pangan; 2) Bahan acuan (*bench mark*) dalam pemantauan dan evaluasi.

d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Partisipatif

Dalam proses perencanaan tersebut didasarkan pada hasil pendataan kondisi awal (*base line*). Penyusunan perencanaan di tingkat kelompok dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat yang difasilitasi oleh pendamping.

Rencana yang disusun ditingkat kelompok mencakup perencanaan penguatan kelompok dan perencanaan pengembangan usaha kelompok yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) yang selanjutnya dijadikan bahan dalam penyusunan rencana di tingkat desa. Penyusunan perencanaan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan aparat, pemangku kepentingan (tokoh masyarakat) untuk dapat mengumpulkan informasi kondisi desa, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan desa menjadi rawan pangan (lahan, air, iklim, teknologi, input produksi, SDM), dan langkah-langkah pemecahan secara mandiri. Perencanaan Desa dilakukan secara Partisipatif melalui teknik PRA oleh Tim Pangan Desa bersama *stake holder* yang difasilitasi oleh Pendamping. Perencanaan pembangunan desa merupakan rencana mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil *base line survei* dan PRA.

e. Pendampingan

Untuk mencapai kondisi tersebut perlu adanya pendampingan kelompok yang terprogram dan terencana dalam arti pendampingan dari pihak di luar masyarakat sasaran hanya bersifat sementara, sehingga diharapkan pendampingan itu akan dilaksanakan oleh motivator yang berasal dari masyarakat. Dalam Program desa mandiri pangan rekrutmen pendamping dilaksanakan pada tahun pertama atau tahun awal pelaksanaan program, kondisi ini dengan pertimbangan tenaga pendamping harus sudah bisa secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program khususnya pada tahun pertama tahap persiapan desa. Petugas pendamping masyarakat ditetapkan kabupaten yang ditumbuhkan dari tokoh lokal sebagai kader non formal di tingkat akar rumput yang berperan meneruskan fungsi pendampingan dan motivator dalam mendorong pengembangan usaha masyarakat di masa akan datang secara berkelanjutan serta memiliki komitmen, profesional dan motivasi.

Pendampingan juga dimaksudkan untuk dapat memotivasi kelompok mandiri untuk dapat mencapai tahapan kelompok mandiri yang berkesinambungan, untuk dapat mencapai tahapan tersebut pendampingan harus secara konsisten dan terencana. Adapun kelompok dapat dikatakan pada tahapan "Mandiri" apabila setelah dilaksanakan evaluasi oleh Tim Evaluasi. Tugas tenaga pendamping adalah: 1) Mengumpulkan data dasar kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat; 2) Menumbuhkan kader pangan desa dan kelompok afinitas; 3) Menumbuhkan lembaga keuangan desa; 4) Membimbing kelompok dalam mengembangkan usaha produktif.

f. Pelatihan

Proses pelatihan dalam program desa mandiri pangan dilakukan berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten maupun desa dengan peserta dari mulai aparat pelaksana,

fasilitator, tenaga pendamping, kelompok afinitas dan masyarakat sebagai pelaksana langsung program. Materi pelatihan menyesuaikan dengan peserta baik pelatihan manajemen, teknis maupun tentang operasional desa mandiri pangan. Dari pelatihan yang dilaksanakan diharapkan dihasilkan umpan balik bagi peserta sehingga mampu menguasai, memahami materi latihan dengan tahapan (1) mengalami; (2) mengungkapkan; (3) menganalisis; (4) menemukan prinsip; (5) menerapkan prinsip. Adapun tahapan pelaksanaan pelatihan partisipatif adalah: 1) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang merupakan pembulatan dari keseluruhan materi pelatihan dan dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang akan peserta lakukan; 2) Evaluasi seluruh proses pelatihan oleh peserta yang berguna untuk pembelajaran mereka dalam kegiatan pelatihan berikutnya.

g. Pembentukan Kelompok Fasilitator

Kelompok fasilitator pada program desa mandiri pangan adalah pembentukan pokja pangan desa yang ada di tingkat kabupaten yang bertugas dalam pelaksanaan pengawalan program. Unsur anggota dalam pokja pangan kabupaten terdiri dari instansi teknis di tingkat kabupaten termasuk didalamnya dari unsur pemda. Sementara di tingkat desa ada kelembagaan pengambil keputusan meliputi tim pangan desa, lembaga keuangan desa termasuk unsur aparat ditingkat desa berikut tokoh masyarakat yang ada. Tugas kelembagaan pengambil keputusan ini terkait dengan keberhasilan pelaksanaan program desa mandiri pangan. Secara koordinatif tim pangan desa, lembaga keuangan desa dan aparat akan mengawal proses pelaksanaan program dari mulai perencanaan awal, tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program di tingkat desa.

h. Pemberdayaan Kelompok Afinitas

Sasaran program desa mandiri pangan adalah meningkatkan pendapatan, produksi pangan dan ketahanan pangan sekaligus memperbaiki kondisi hidup kelompok sasaran secara berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut maka satu komponen dari empat komponen yang ada dalam program desa mandiri pangan adalah pemberdayaan kelompok afinitas yang merupakan komponen pertama sekaligus komponen utama yang akan menjadi motor penggerak bagi tiga komponen lainnya (komponen pengembangan pertanian dan peternakan, komponen pengembangan infrastruktur pedesaan, dan komponen pengembangan institusi dan manajemen program). Proses pemberdayaan kelompok afinitas menuju kemandirian masyarakat dalam Program desa mandiri pangan melalui penumbuhan kelompok mandiri baik pada kegiatan pertanian, perikanan, peternakan kerajinan, dan jasa perdagangan. Dengan melalui kelompok afinitas ini diharapkan pada gilirannya kelompok-kelompok tersebut akan mencapai kemandirian kelompok sehingga menjadi berkesinambungan.

2. Kajian Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai

Partisipasi masyarakat Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai pada dasarnya memberikan tanggapan yang positif berkaitan dengan kegiatan program desa mandiri pangan. Tanggapan dan usulan terhadap program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai yang dapat diidentifikasi berdasarkan informasi dan partisipasi masyarakat serta observasi lapangan antara lain adalah:

a. Seleksi Desa Mandiri Pangan

Seleksi desa mandiri pangan merupakan dasar atau *entry point* masuknya program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai. Seleksi desa mandiri pangan menetapkan Desa Bonto Sinala Kabupaten Sinjai sebagai lokasi program desa mandiri pangan dengan pertimbangan karena masih besarnya jumlah KK miskin, besarnya potensi (SDA maupun SDM) dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan dan besarnya dukungan aparat dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Selain itu seleksi desa mandiri pangan sangat vital terutama terkait pelaksanaan program desa mandiri pangan secara berkelanjutan. Seleksi desa yang diikuti dengan penetapan desa membawa konsekuensi pada dukungan masyarakat terhadap program, penetapan desa yang salah baik lokasi maupun waktunya akan berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program. Lokasi desa yang salah disamping tidak akan mendapat dukungan masyarakat, juga kegiatan yang diimplementasikannya menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,

b. Penyusunan Data Dasar Desa

Penyusunan data dasar desa telah dilakukan yakni dengan melakukan pendataan tentang data dasar rumah tangga dan survei rumah tangga sebagai dasar untuk implementasi program desa mandiri pangan. Permasalahannya data dasar desa dimaksud difokuskan pada KK miskin dengan jumlah yang terbatas yaitu sebanyak 40 orang, ini dimungkinkan karena keterbatasan dana yang ada. Walaupun ini telah menjadi kesepakatan tahapan pelaksanaan namun secara tidak langsung harapan untuk mendapatkan manfaat program menjadi tertunda (setelah perguliran) karena baru mendapatkan setelah kelompok pertama penerima manfaat sejumlah 40 orang diatas, itupun dikawatirkan akan sangat berbeda sentuhannya dibandingkan ketika program itu masih dalam kawalan ditahun program.

c. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Partisipatif

Keinginan masyarakat terkait dengan program desa mandiri pangan adalah agar setiap usulan/masukan terkait dengan perbaikan kualitas hidupnya dapat diakomodasi. Untuk dapat mengakomodasi usulan masyarakat dalam program diarahkan pada kelompok-kelompok

afinitas yang telah terbentuk baik yang sebelumnya sudah ada maupun baru terbentuk. Wadah untuk menampung aspirasi kelompok yakni dalam forum pertemuan penyusunan rencana yang diadakan dengan sebagai arah untuk pelaksanaan kegiatan lebih lanjut. Penyusunan rencana pembangunan desa partisipatif telah ada dan disusun namun sosialisasi hasil perencanaan sebagai arah untuk tindak lanjut kegiatan serta kawalan dari masyarakat masih belum tersosialisasikan secara merata, hanya kepada kelompok-kelompok afinitas yang telah terbentuk dan menerima manfaat awal yang tahu. Sementara masyarakat yang belum menerima manfaat atau akan mendapatkan setelah perguliran belum secara detail mengetahuinya.

d. Pendampingan

Pendamping desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai adalah penduduk setempat yang selama ini banyak terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di desa sehingga masyarakat sangat paham dengan pendamping dimaksud, dari basis pendidikannya pun mendukung yakni pertanian serta mempunyai kemampuan untuk memotivasi masyarakat dalam program pendampingan dan yang lebih penting masyarakat percaya tentang tugas dan kemampuan pendamping. Sedangkan terkait dengan tugas pendampingan yang selama ini dilaksanakan pendamping mempunyai kemampuan untuk melakukan kawalan program, baik dalam merencanakan kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta mencari solusi atas permasalahan yang timbul serta mengkomunikasikan dengan masyarakat. Pendamping juga menjadi jembatan dalam melakukan komunikasi baik dengan fasilitator maupun pembina baik ditingkat desa, kabupaten maupun provinsi.

e. Pelatihan

Pelatihan berkenaan dengan program desa mandiri pangan diberikan kepada baik pendamping, fasilitator tingkat desa kelompok afinitas maupun masyarakat dengan materi meliputi kawalan kelompok kepada pendamping dan fasilitator serta pelatihan teknis baik teknis budidaya untuk pertanian, peternakan dan perikanan serta teknis lainnya untuk kerajinan maupun jasa perdagangan. Pelatihan juga menyangkut manajemen usaha termasuk pemasaran dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan usaha. Satu hal muatan atau materi pelatihan yang terkait dengan pemberdayaan wanita maupun tata laksana keluarga/ rumah tangga masih dirasa kurang.

f. Pembentukan Kelompok Fasilitator

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, menyebabkan minimnya akses masyarakat terhadap penentu kebijakan. Namun demikian, akses mereka secara politis terwakili dengan adanya BPD (Badan Perwakilan Desa) serta keberadaan Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun (Kadus) sebagai pembantu aparat

desa dalam proses pembangunan. Selain itu, di Kawasan Desa Bonto Sinala juga terdapat karang taruna maupun tokoh masyarakat. Dalam Program desa mandiri pangan anggota masyarakat diatas berperan sebagai fasilitator yang duduk dalam pokja pangan desa. Bersama dengan pendamping lokal dan petugas teknis baik dari kabupaten maupun provinsi pokja pangan desa menjembatani pelaksanaan program sejak dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun pemecahan masalah yang muncul. Manfaat ini banyak dirasakan oleh masyarakat langsung maupun kelompok afinitas.

g. Pemberdayaan Kelompok Afinitas

Munculnya kelompok afinitas merupakan salah satu keberhasilan pemberdayaan dalam rangka penguatan kelembagaan. Kelompok-kelompok yang sudah ada di desa namun kurang maksimal dalam berusaha dicoba untuk sebesar mungkin diberdayakan untuk mendapatkan akses dana pengetahuan tentang teknis berusaha termasuk membangun jejaring pemasaran termasuk akses permodalan yang lebih besar melalui perbankan. Sementara kelompok afinitas baru coba ditumbuhkan dengan mengacu atau belajar dari kelompok yang ada ditambah dengan bekal pembinaan, pendampingan dan kawalan baik dari fasilitator, pendamping maupun aparat. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan kelompok ini akan mandiri untuk bisa menarik kelompok-kelompok lain termasuk kelompok baru.

Sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi lokal pemberdayaan kelompok afinitas ini pada hakekatnya adalah kemitraan antara pemerintah di daerah/lokal dengan para stakeholders termasuk sektor swasta dalam mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi ditingkat daerah dan menciptakan lapangan kerja baru, dengan ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah titik beratnya pada kebijakan mendayagunakan potensi sumberdaya manusia, institusional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarah pada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi..

h. Usulan Anggaran Pembiayaan

Ada beberapa program pembangunan yang masuk dan ada di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai. Program dimaksud berasal dari instansi yang ada baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Pembangunan desa disamping menggunakan anggaran rutin yang ada di desa juga memanfaatkan dari sumber-sumber pendanaan yang mungkin untuk dimanfaatkan, juga bersumber dari swadaya masyarakat baik ditingkat dukuh, RW maupun RT. Namun demikian, dana yang berasal dari program pembangunan selama ini membingungkan dikarenakan sumber dana yang berasal dari pemerintah baik kabupaten, propinsi, maupun pusat menuntut pengelolaan yang berbeda termasuk tata cara penggunaan

maupun operasionalnya. Dalam menterjemahkan kebijakan yang datang dari aparat ditingkat desa termasuk tokoh masyarakat mengalami kebingungan. Pada masyarakat penerima dana program juga kadang rancu karena dalam satu desa muncul banyak aturan-aturan terkait pemanfaatan dana.

KESIMPULAN

Implementasi kegiatan program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai masih berjalan sampai tahun pertama, serta banyak kegiatan yang terdapat dalam setiap tahapan kegiatan dari mulai persiapan, penumbuhan sampai akhirnya pengembangan yang menunjukkan keberhasilan, memang berdasarkan identifikasi program, masih ada beberapa hal yang kurang sesuai dari kegiatan yang telah diimplementasikan tersebut. Salah satunya adalah penetapan desa yang terkeasaan masih sepihak ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat tahu bahwa desanya lokasi desa mandiri pangan setelah program masuk dan dilakukan sosialisasi, sehingga masih ada kesan bahwa program desa mandiri pangan merupakan program yang bersifat *topdown*, walaupun pada banyak kegiatan lainnya telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh program.

Partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai berada pada tingkatan *partnership* sesuai dengan tingkatan partisipasi Arstein yang dicirikan dengan adanya partisipasi secara aktif dari masyarakat pada program baik pada tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi termasuk dalam pemecahan permasalahan yang timbul. Masyarakat juga merasa mendapatkan manfaat yang nyata atas pelaksanaan program diantaranya terpenuhinya kebutuhan akan kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Peran pemerintah dalam pelaksanaan program inipun dirasa sangat besar, sudah ada pembagian kewenangan yang jelas antara peran pemerintah dan masyarakat serta mereka tidak merasa adanya intervensi yang terlalu jauh dari pemerintah atas kegiatan program yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyono, Agus. 2008. *Studi Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Edukasi. Anonim, 2006. *Pedoman Umum Program Desa mandiri Pangan*. Jakarta: Badan ketahanan Pangan Departemen Pertanian.
- , 2006. *Pedoman Operasional Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahap Persiapan*. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian.
- , 2006. *Pedoman Operasional Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahap Penumbuhan*. Jakarta: Badan ketahanan Pangan Departemen Pertanian.
- Burke, Edmund M. 2004. *Sebuah Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota (Terjemahan A Participatory Approach to Urban Planning)*. Bandung: Penerbit Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- H.A.R.Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan; Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- I Nyoman Sumaryadi. 2010. *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- John M. Echols & Hasan Shadily. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002. Tentang Pangan.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soetomo, 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius
- Sugiyah. 2001. *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates. Kabupaten Kulon Progo*. Tesis. PPs-UNY.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Tentang Pangan.